

DARI *CULTURAL LITERACY* KE LITERASI BUDAYA: REFEKSİ DARI KONTROVERSI PEMIKIRAN E.D. HIRSCH JR.

Budiawan¹

budiawan4@ugm.ac.id

¹ Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Abstract

This article is a reflection of the controversies on the thoughts of E.D. Hirsch Jr., an American literary critic and theorist of education by the end of the twentieth century, concerning the idea of Cultural Literacy. In his prominent book, *Cultural Literacy: What Every American Needs to Know* (1987), he criticizes the education system in the US, which he perceives to have been too liberalistic and too accommodating the racial and cultural pluralism; and Hirsch Jr. wants to return the education system to the one which could produce a high degree of literacy on the roots of “western” civilization as a sort of common denominator for the whole US citizens. It is in this sense Hirsch Jr. defines the concept of Cultural Literacy, which is a condition in which the whole US citizens are expected to know the roots of their modern civilization so that they can communicate with one another in such a way that their national sense of being American is shaped. This article attempts to draw what lessons can be taken from the controversies of Hirsch Jr.’s book for the making and implementation of the concept of “Literasi Budaya” in the Indonesian context. One of the lessons is dealing with the idea of how to strengthen the bonding ties of nationhood without sacrificing the traditional identity of localness.

Keywords: cultural literacy, education system, nationhood, localness.

PENDAHULUAN

Frasa “Literasi Budaya” jelas merupakan terjemahan adaptasi dari Cultural Literacy. Akan tetapi makna masing-masing frasa itu tidak persis sama antara yang satu dan lainnya. Sebab, makna lebih dari sekadar definisi yang ditemukan di dalam kamus. Makna juga ditemukan di dalam suatu konteks, entah konteks linguistik atau non-linguistik (Nouraldeem, 2015: 13); dan masing-masing frasa itu muncul dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itulah artikel ini diberi judul “Dari *Cultural Literacy* ke Literasi Budaya”, yang mengasumsikan bahwa konteks – dalam arti non-linguistik – yang melahirkan masing-masing konsep itu berbeda sehingga maknanya pun tentu tidak persis sama.

Meskipun istilah *Cultural Literacy*, menurut Oxford Dictionaries Online, bisa

dilacak hingga dekade 1940-an (Shliakhovchuk, 2019: 5), ia menjadi populer di “barat” dan kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia sejak terbitnya karya E.D. Hirsch Jr., *Cultural Literacy: What Every American Needs to Know* (1987). Buku ini pada intinya merupakan kritik terhadap sistem pendidikan di Amerika Serikat (AS) yang oleh Hirsch Jr. dianggap terlalu liberalistis dan akomodatif terhadap kemajemukan ras dan budaya; dan Hirsch Jr. ingin mengembalikan sistem yang bisa menghasilkan tingkat literasi yang memadai tentang akar-akar peradaban “barat” modern sebagai semacam *common denominator* segenap warga AS. Dalam pengertian itulah Hirsch Jr. memaknai konsep *Cultural Literacy*, yakni suatu kondisi dimana segenap warga AS

diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kurang lebih sama tentang akar-akar peradaban modern mereka, sehingga antar mereka bisa saling berkomunikasi, dan dengan begitulah terbentuk identitas kolektif ke-“Amerika”-an. Buku ini menuai kontroversi. Banyak yang menerima dan mendukung ide yang ditawarkan di dalam buku tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menolaknya. Artikel ini selain ingin memaparkan kontroversi itu, juga berupaya mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kontroversi buku Hirsch Jr. tersebut bagi pengembangan ide dan praktik “Literasi Budaya” di Tanah Air.

Artikel ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, akan dipaparkan kemunculan wacana *Cultural Literacy* dalam skala global sebagaimana dideklarasikan lembaga atau forum internasional. Masih di bagian yang sama, akan dipaparkan bagaimana wacana *Cultural Literacy* di tingkat internasional itu diadopsi di Indonesia menjadi “Literasi Budaya” dengan beragam konsekuensi dalam praktiknya. Kedua, akan dipaparkan trajektori *Cultural Literacy* berikut konteks permasalahannya. Paparan juga mencakup diskusi ringkas isi buku Hirsch Jr. sebagaimana disebutkan di atas. Ketiga, akan didiskusikan kontroversi atas buku Hirsch Jr. tersebut, serta pelajaran-pelajaran apa yang bisa dipetik darinya. Terakhir, semacam kesimpulan.

LITERASI-LITERASI DASAR

Pada tahun 2015 World Economic Forum (WEF) menerbitkan sebuah kertas kerja yang berjudul, “New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology”. Dalam kertas kerja itu disebutkan ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan di abad 21. Ada enam belas ketrampilan yang disebutkan di situ, dan keenam belas ketrampilan itu dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu (a) *Foundational Literacies* (Literasi-literasi

Dasar), (b) *Competencies* (Kompetensi), dan (c) *Character Qualities* (Kualitas karakter). Yang dimaksud literasi dasar adalah bagaimana siswa menerapkan ketrampilan pokok dalam tugas hidup sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud kompetensi adalah bagaimana siswa memahami berbagai tantangan yang kompleks; dan yang dimaksud kualitas karakter adalah bagaimana siswa memahami lingkungan mereka yang terus berubah. Artinya, yang dibutuhkan bukan hanya ketrampilan untuk bertahan hidup (*survival*) dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga antisipatif terhadap berbagai kemungkinan di masa depan.

Dalam literasi dasar disebutkan ada enam ketrampilan, yaitu: (a) *Assessed skills of literacy* (kemampuan baca dan tulis), (b) *Numeracy* (melek angka/berhitung), (c) *Scientific literacy* (melek ilmu pengetahuan), (d) *ICT literacy* (melek teknologi informasi dan komunikasi), (e) *Financial literacy* (melek perkara keuangan), dan (f) *Cultural and civic literacy* (melek budaya dan kewargaan). Yang dimaksud dengan poin f, yaitu *cultural and civic literacy*, adalah “ability to understand, appreciate, analyse and apply knowledge of the humanities” (Kemampuan memahami, mengapresiasi dan menganalisis serta menerapkan pengetahuan humaniora atau studi-studi kemanusiaan). Konsep berikut pengertiannya inilah yang kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia, c.q., Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi “Literasi Budaya dan Kewargaan” sebagai bagian dari Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang mulai digencarkan pada 2016.

GLN itu sendiri merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam buku *Panduan Gerakan Literasi Nasional* terbitan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, disebutkan bahwa tujuan GLN adalah “untuk

menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup” (hlm. 5). Sebagai bagian dari GLN, “Literasi Budaya dan Kewargaan” itu kemudian dijabarkan dalam buku *Materi Pendukung Literasi Budaya dan Kewargaan*, juga terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Di dalam buku itu frasa “Literasi Budaya dan Kewargaan” (LBK) jelas merupakan padanan kata *Cultural and Civic Literacy* (CCL)-nya WEF.

Di dalam buku itu, “Literasi Budaya” didefinisikan sebagai “kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa”. Sedangkan “Literasi Kewargaan” didefinisikan sebagai “kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara”. Kemudian “Literasi Budaya dan Kewargaan” didefinisikan sebagai “kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu bangsa dan budaya” (hlm. 3). Per definisi ada perbedaan, atau tidak persis sama antara *Cultural and Civic Literacy*-nya WEF dan “Literasi Budaya dan Kewargaan”-nya GLN.

Dalam CCL tidak ada batasan lingkup dimana jenis literasi itu mesti diterapkan. Mungkin lingkungannya universal, karena WEF menginginkannya sebagai prinsip universal. Selain itu, basis pengetahuan yang hendak dijadikan penentu sikap (dan tindakan) dieksplisitkan, yakni *humanities*, yang mencakup mulai dari sastra, sejarah, filsafat, bahasa, seni, dan sebagainya. Sedangkan dalam LBK, batasan lingkungannya adalah negara-bangsa, dan basis pengetahuannya tidak eksplisit. Kalau hal ini dikaitkan dengan GLN, dan GLN itu sendiri merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri tentang penumbuhan Budi Pekerti, maka besar kemungkinan bahwa basis pengetahuannya adalah

Pendidikan Budi Pekerti. Secara konseptual Pendidikan Budi Pekerti dimaknai sebagai “usaha sadar melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengajaran dan latihan, serta keteladanan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam segenap peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan budi pekerti juga merupakan suatu upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan perilaku peserta didik agar mau dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, seimbang antara lahir-batin, jasmani-rohani, material-spiritual, dan individu-sosial” (Balitbang Puskur Depdiknas, 2001, sebagaimana dikutip dalam Muhtadi, 2010: 6). Pendek kata, pendidikan budi pekerti merupakan jalan untuk mewujudkan manusia ideal. Bila ditelisik lebih jauh lagi, sosok manusia ideal itu bukan hanya yang dibayangkan/diharapkan berketrampilan agar bisa bertahan hidup dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga yang “religius”, dalam arti “khusuk dalam hubungannya dengan Tuhan” dan “patuh kepada agama” (Muhtadi, 2010: 7) – satu hal yang tidak dijumpai dalam rumusan CCL-nya WEF.

Pengertian dan penjabaran LBK yang tidak persis sama dengan CCL-nya WEF itu bukanlah sesuatu yang keliru. Adopsi suatu konsep memang seharusnya disesuaikan dengan konteks. Setiap konsep lahir dari sekaligus merupakan respons terhadap konteks permasalahan tertentu. Begitu pula dengan konsep *Cultural Literacy* dan “Literasi Budaya”.

Asumsi CCL-nya WEF tidak lepas dari, atau merupakan modifikasi terhadap wacana *Cultural Literacy* yang berkembang di dunia “barat”, khususnya Amerika Serikat. Sebagai konsep, *Cultural Literacy* mempunyai trajektorinya sendiri, sebelum kemudian menjadi diskursif di AS pada akhir 1980-an berkat buku E.D. Hirsch Jr. sebagaimana disinggung di atas. Asumsi “Literasi Budaya” sebagai gagasan impor

yang kemudian diterjemahkan tentu juga berangkat dari sekaligus merupakan respons terhadap konteks permasalahan di Indonesia.

CULTURAL LITERACY: TRAJEKTORI DAN KONTEKS PERMASALAHANNYA

Secara tradisional *Literacy* dimengerti sebagai “kemampuan membaca, menulis, berhitung”. Pada abad 18 dan 19, negara-negara Eropa yang telah terindustrialisasikan mengalami kemajuan yang cukup baik dalam mengurangi angka “illiteracy” (ketidakmelekan) dalam ketiga hal itu. Tingkat literasi penduduk secara umum mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai dengan pertengahan abad 20 tingkat literasi itu terus meningkat secara dramatis. Menurut data UNESCO keluaran 2017 (sebagaimana dikutip Shliakovchuk, 2019: 3), sejak 1950 hingga 2015 tingkat literasi orang dewasa secara global rata-rata meningkat 5 persen setiap dekade, yakni dari 55,7 persen pada 1950 menjadi 86,2 persen pada 2015.

Pengertian *literacy* semacam itu telah menjadi pemahaman populer sehari-hari, meskipun kini cakupannya telah berkembang jauh lebih luas, beragam, dan kompleks, termasuk munculnya istilah *Cultural Literacy*. Menurut *Oxford Dictionaries Online*, sebagaimana telah disebutkan di atas, asal-usul istilah *Cultural Literacy* bisa dilacak hingga 1940-an dan didefinisikan sebagai “kemampuan untuk menganalisis dan memahami masyarakat atau budaya yang spesifik, akrab dengan adat istiadat dan karakteristik suatu budaya” (Shliakovchuk, 2019: 5).

Definisi serupa bahkan sekaligus ditunjukkan metodologinya dilontarkan Naomi Segal (2015: 7), yang menyatakan bahwa *Cultural Literacy* merupakan suatu cara untuk melihat isu-isu sosial dan budaya – khususnya isu-isu perubahan dan mobilitas – melalui lensa berpikir literer (*through the lens of literary thinking*).

Dengan kata lain, ini merupakan suatu cara menalar sejumlah perkara dengan melihat tekstualitas, fiksionalitas, retoritas, serta historisitas perkara-perkara tersebut.

Pada awal 1970-an Paulo Freire memperluas pengertian *literacy* lebih dari sekadar ketrampilan baca dan tulis, tetapi bagaimana memahami apa yang dibaca dan menuliskan apa yang dipahami. Freire yang terkenal dengan bukunya yang berjudul *Paedagogy of the Oppressed* (Pendidikan Kaum Tertindas) menekankan pada pembentukan kesadaran, karena baginya pendidikan adalah satu bentuk penyadaran (*conscientization*). Menurutnya *literacy* sama sekali bukan menghafal kata-kata dan kalimat, tetapi pembentukan sikap untuk mencipta dan mencipta-ulang, atau suatu transformasi diri yang membuahkan “a stance of intervention in one’s context” (pendirian yang memungkinkan seseorang mengubah konteks/situasi yang mengungkungnya) (Shliakovchuk, 2019: 4).

Pandangan Freire itu tidak lepas dari konteks masyarakat Amerika Latin yang merupakan fokus kepeduliannya. Sebagaimana diketahui, Amerika Latin sebagai bekas koloni Portugis dan Spanyol mewarisi struktur masyarakat yang timpang antara elite tuan tanah dan massa petani. Semenjak pertengahan abad 20, struktur masyarakat yang timpang itu ditumpangi oleh kekuatan imperialisme AS, yang membuat ketertindasan rakyat kebanyakan di negara-negara Amerika Latin menjadi berlapis-lapis, yaitu tertindas oleh struktur internal dan eksternal. Dalam konteks seperti itulah Freire mendefinisikan *Literacy* sebagai satu bentuk konsientiasi (penyadaran). Pemikiran Freire ini menyebar ke kalangan aktivis gerakan masyarakat sipil di negara-negara Dunia Ketiga, tetapi kurang bergaung di kalangan para pembuat kebijakan dan institusi-institusi internasional karena dianggap terlalu radikal (Kirkendall, 2010).

Berbeda dari Freire yang lebih menekankan pada pembentukan kesadaran diri seseorang dalam struktur masyarakat

yang menindas dan tidak adil, Herbert B. Wilson dalam karyanya yang berjudul *Cultural Literacy Laboratory* (sebagaimana dikutip Shliakovchuk, 2019) lebih menekankan pada kesadaran seseorang akan afiliasi etnis dan kulturalnya. Menurut Wilson, *Cultural Literacy* dipahami sebagai “pandangan kedalam budaya sendiri, kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang yang secara kultural berbeda, serta kecakapan komunikasi transkultural dan kesadaran etnisitas dirinya” (Shliakovchuk, 2019: 5). Tampak bahwa kepedulian Wilson lebih pada komunikasi antarbudaya, yang memprasyaratkan literasi atas budayanya sendiri terlebih dahulu.

Pada dekade 1980-an dan 1990-an kata *Literacy* menjadi metafor untuk berbagai jenis ketrampilan yang relevan dengan dinamika kehidupan modern yang terus berubah. *Literacy* memberdayakan seseorang untuk mengembangkan pengetahuan dan potensinya, meraih tujuannya, serta berpartisipasi dalam masyarakat secara luas. Dari sinilah muncul *Literacy Studies* (Shliakovchuk, 2019: 4); dan kelihatannya pengertian semacam inilah yang kelak kemudian diadopsi agensi-agensi internasional.

Berpartisipasi dalam masyarakat secara luas itulah yang mendapat penekanan secara khusus oleh E.D. Hirsch Jr. Ia prihatin melihat rendahnya pengetahuan umum masyarakat Amerika Serikat. Padahal pengetahuan umum itu merupakan sarana seseorang bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas, bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga internasional. Bagaimana komunikasi seorang warga AS bisa “nyambung” dengan warga negara-negara lain kalau, misalnya, pengetahuannya tentang tokoh-tokoh besar dunia, sejarah dunia, geografi dunia, sangat terbatas? Bahkan bagaimana antarwarga AS sendiri bisa saling berkomunikasi kalau pengetahuannya tentang sejarah terbentuknya AS berikut tokoh-tokoh pendirinya itu sendiri sangat minim? Bagaimana antarwarga AS beda ras bisa

saling berkomunikasi kalau apa yang mereka ketahui hanya sejarah dan budaya ras masing-masing?

Hirsch Jr. melihat sebab utama fakta yang menurutnya sangat memprihatinkan itu adalah sistem pendidikan AS yang sejak sebelum Perang Dunia II menganut filsafat “naturalisme”, yakni membiarkan anak tumbuh secara alamiah sebelum anak itu mampu berpikir secara mandiri. Tugas institusi pendidikan hanya menciptakan rangsangan-rangsangan dan memfasilitasi “proses pencarian pengetahuan” para anak didik. Sistem pendidikan yang liberalistis ini bersumber dari filsafat Jean Jacques Rousseau, yang kemudian dirumuskan secara operasional dalam filsafat pragmatisme John Dewey (Hirsch Jr., 1987: xiv – xv).

Sebab lainnya, dan itu merupakan konsekuensi logis dari sistem pendidikan yang liberalistis tersebut, adalah penghapusan pelajaran-pelajaran sejarah dan sastra Inggris yang kanonik hanya karena para pendidik tidak ingin disebut “imperialis kultural” oleh (para pembela hak-hak) kelompok-kelompok ras minoritas. Padahal, menurut Hirsch Jr., pengetahuan-pengetahuan kanonik seperti itu seharusnya merupakan semacam *common denominator* bangsa Amerika (House, et.al., 1991: 59)

Bagi Hirsch Jr. sistem pendidikan yang bersumber dari filsafat pendidikan semacam itu telah menyebabkan tingkat *cultural literacy* warga AS tertinggal dari negara-negara industri maju lainnya. Apa yang oleh seorang sarjana lain disebut *world knowledge* (pengetahuan dunia), oleh Hirsch Jr. disebut *cultural literacy*, yang ia pahami sebagai “jejaring informasi yang harus dimiliki seorang pembaca yang kompeten”. Dari sini pulalah ia menawarkan konsep *Cultural Literacy* sebagai “kemampuan untuk sepenuhnya ‘nyambung’ dengan budayanya, dengan memahami tanda-tanda/kode-kode budaya itu, simbol-simbolnya, ungkapan-ungkapannya, memiliki rujukan ke peristiwa masa lalu,

lelucon, nama, tempat, dan sebagainya” (Hirsch Jr., 1987: 2). Jika diterjemahkan secara sederhana, definisi itu kira-kira seperti ini: “Anda secara kultural disebut ‘literate’ bila anda kalau bicara dengan orang lain dalam budaya yang sama nyambung”. Dalam konteks itulah pemahaman “kode-kode kultural” yang diwujudkan dalam *shared knowledge* atau pengetahuan-pengetahuan yang kanonik dipahami.

Setelah menerbitkan buku yang menggemparkan wacana publik di AS itu, Hirsch Jr. menerbitkan sekuelnya, yaitu *The Dictionary of Cultural Literacy* (1988). Di dalam *The Dictionary* ini Hirsch Jr. tidak lagi bicara tentang prinsip-prinsip dan “nalar” *Cultural Literacy*, tetapi mencantumkan daftar entri atau kata-kata yang mesti dipahami setiap warga AS tidak lain agar *literate* secara kultural. Hirsch Jr., sebagaimana dia katakan dalam buku sebelumnya, tidak bermaksud setiap orang harus menjadi pakar dalam setiap bidang, tetapi setiap orang harus paham dengan hal-hal yang dijelaskan seorang pakar (Hirsch Jr., 1987: 3).

Hirsch Jr. mungkin benar dengan argumentasinya itu. Bahwa untuk menjadi bagian dari masyarakat modern yang terus berubah diperlukan kecakapan untuk bisa memahami – tanpa harus menjadi ahli – setiap perkara yang dijumpai dalam hidup sehari-hari. Akan tetapi persoalannya adalah pengertian *Cultural Literacy* yang dia sodorkan itu mengasumsikan adanya monokultur dalam masyarakat. Seakan-akan parameter nasionalisme harus sama; atau nasionalisme dipersamakan dengan *Cultural Literacy* (Shliakovchuk, 2019: 6). Antara lain pada poin inilah buku Hirsch Jr. tersebut memicu perdebatan dan kontroversi. Sejumlah pihak mengkritik Hirsch Jr. “konservatif”, dalam arti ingin menggiring orang tetap berada dalam lingkungan kulturalnya masing-masing. Tetapi ada juga yang mengkritik Hirsch Jr. “konservatif” dalam pengertian ingin mendorong setiap warga Amerika Serikat – apapun warna

kulitnya – harus mengetahui dan mengerti setiap hal penting yang dianggap sebagai “akar” peradaban kulit putih (House et.al., 1991).

Hal yang terakhir itu jelas sesuatu yang bersifat politis, tetapi Hirsch Jr. menganggapnya non-politis. Bahwa ia ingin mengembalikan supremasi peradaban “kulit putih” jelas sesuatu yang politis. Akan tetapi posisi politisnya yang partikular itu dia bungkus dengan argumentasi-argumentasi yang dia anggap non-politis. Seakan-akan muatan suatu praktik pendidikan itu perkara teknis, padahal jelas itu sesuatu yang politis (House, et.al., 1991: 66).

Terhadap segala kritik itu, Hirsch Jr. tetap berada dalam pendirian bahwa Amerika sebagai bangsa tetap memerlukan *common denominator*, dalam arti kode-kode sosial-kultural-historis-bahasa yang sama, dan itu hanya ditemukan dalam akar-akar peradaban kulit putih Eropa. Selanjutnya dalam pergaulan antarbangsa, warga Amerika perlu memahami perjumpaan peradaban Eropa kulit putih dengan peradaban-peradaban besar dunia lainnya, atau apa yang oleh Profesor Chall disebut “world knowledge” (Hirsch Jr., 1987: 2).

Di bagian berikut ini akan didiskusikan pelajaran-pelajaran apa yang bisa dipetik dari kontroversi atas buku Hirsch Jr. tersebut bagi pengembangan konsep “Literasi Budaya” di Indonesia.

REFLEKSI DARI KONTROVERSI PEMIKIRAN E.D. HIRSCH JR.

Penulis tidak tahu bagaimana kelanjutan atau implikasi dari debat akademik atas buku Hirsch Jr. tersebut terhadap kebijakan pendidikan nasional di AS. Penulis juga tidak tahu seberapa jauh reformasi pendidikan yang dianjurkan Hirsch Jr. itu dilaksanakan di AS. Yang sedikit penulis ketahui, bila kita “googling” dengan kata-kata kunci “E.D. Hirsch Jr. and Educational Policy in the US”, adalah terus bermunculannya pendapat-pendapat pro dan kontra terhadap pemikiran Hirsch Jr.

tersebut, baik pendapat orang “awam” yang tertuang dalam blog-blog pribadi maupun pendapat akademik para ahli yang muncul di jurnal-jurnal ilmiah. Tidak sedikit pula yang menjadikan karya Hirsch Jr. tersebut sebagai semacam kerangka teori untuk membahas kebijakan pendidikan di luar AS. Artinya, karya Hirsch Jr. yang menuai kontroversi itu justru merupakan karya yang sangat berpengaruh dalam wacana kebijakan pendidikan, bukan hanya di AS tetapi juga di berbagai belahan dunia lain. Mungkin antara lain karena itulah agensi-agensi internasional merasa perlu mencantumkan *Cultural Literacy* sebagai salah satu tujuan yang perlu diwujudkan dalam Visi Pendidikan abad 21.

Yang jelas ada sejumlah pelajaran yang bisa kita petik dari kontroversi pemikiran Hirsch Jr. tersebut. Pertama, apakah dalam negara-bangsa yang pluralistik, seperti Indonesia, demi mengakomodasi aspirasi kelompok kultural yang beragam (secara adil dan setara), penanda-penanda “common denominator” yang mengikat semuanya kedalam komunitas “bangsa” mesti harus dikorbankan? Kedua, apakah demi menegakkan kembali “common denominator” sebagai pengikat kebangsaan itu, budaya kelompok mayoritas yang dominan yang harus dikedepankan sembari meminggirkan atau bahkan menyingkirkan budaya kelompok-kelompok minoritas? Ketiga, adakah ruang-ruang negosiasi antara dua pilihan ekstrem itu? Ataukah mesti membayangkan suatu pilihan yang melampaui pilihan-pilihan ekstrem tersebut?, atau bagaimana?

Tiga pertanyaan itu mungkin perlu dipertimbangkan dalam menjabarkan secara detail konsep “Literasi budaya dan kewargaan” kedalam langkah-langkah kebijakan. “Literasi budaya dan kewargaan” yang telah menjadi kebijakan resmi negara jelas berangkat dari sejumlah kondisi sosio-kultural yang mengindikasikan melemahnya tali-tali pengikat kebangsaan. Pertanyaannya adalah pilihan mana yang

mesti diambil agar tali-tali pengikat kebangsaan itu tetap kuat (atau kembali menguat?) sekaligus memperkuat ikatan-ikatan pada “kelokalan” sebagai sumber “tradisi”? Jadi, dengan demikian mempertentangkan “kebangsaan” dengan “tradisi kelokalan” adalah suatu cara berpikir yang keliru; dan itulah sumber pokok kontroversi gagasan reformasi pendidikan Hirsch Jr.

Penulis percaya bahwa dalam bangunan kurikulum pendidikan nasional yang tetap membuka ruang bagi “muatan-muatan lokal”, cara berpikir yang binaristik antara “kebangsaan” dan “tradisi kelokalan” itu tidak menjangkiti para pengambil kebijakan pendidikan nasional. Dalam konteks Indonesia, penulis kira pokok perkaranya bukan pada desain gagasan, tetapi bagaimana mempraktikannya secara konsisten dan lebih berkualitas.

PENUTUP

Artikel ini telah mendiskusikan kemunculan wacana *Cultural Literacy* dan padanan katanya dalam bahasa Indonesia, “Literasi Budaya”. Kemunculan wacana itu secara global tidak lepas dari terbitnya buku pemikir reformasi pendidikan AS, E.D. Hirsch Jr., yang berjudul *Cultural Literacy: What Every American Needs to Know* (1987), dan sekuelnya, *The Dictionary of Cultural Literacy* (1988). Pemikiran Hirsch Jr. tersebut menuai kontroversi, bahkan hingga kini. Ada sejumlah pelajaran yang bisa dipetik dari kontroversi itu, antara lain dan terutama adalah cara berpikir yang mempertentangkan antara “kebangsaan” dan “tradisi kelokalan”. Dalam rancangan bangunan kurikulum pendidikan nasional di Indonesia, cara berpikir semacam itu sebenarnya tidak dijumpai. Bila saat ini tingkat literasi budaya para pelajar kita belum seperti yang diharapkan, pokok permasalahannya bukan pada desain gagasan, tetapi pada pelaksanaan kurikulum pendidikan itu sendiri,

bagaimana melaksanakannya secara konsisten dan lebih berkualitas.

Daftar Pustaka

- Hirsch Jr., E.D. (1987), *Cultural Literacy: What Every American Needs to Know*, Boston: Houghton Mifflin Co.
- House, Ernest R., Emmer, Carol, dan Lawrence, Nancy (1991), "Cultural Literacy Reconsidered", dalam Elfrieda H. Hiebert (ed.), *Literacy for a Diverse Society: Perspectives, Practices and Policies*, New York: Teachers College Press, 58 – 74.
- Kirkendall, Andrew J. (2010), *Paulo Freire and the Cold War Politics of Literacy*, Raleigh: University of North Carolina Press.
- Materi Pendukung Literasi Budaya dan Kewargaan* (2017), Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muhtadi, Ali (2010), "Strategi untuk Mengimplementasikan Pendidikan Budi Pekerti Secara Efektif di Sekolah", *Dinamika Pendidikan*, No. 01, Th. XVII, 1 – 13.
- New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology* (2015), Geneva: World Economic Forum.
- Panduan Gerakan Literasi Nasional* (2017), Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Segal, Naomi (2015), "From Literature to Cultural Literacy", *Humanities*, 4 (1), 68 – 79.
- Shliakovchuck, Elena (2019), "After Cultural Literacy: New Models on intercultural competency for life and work in a VUCA world", *Educational Review*, 73 (2), 1 – 32.